



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

(LAKIP)

KOTA PALU TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA PALU



KATAPENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat,taufik dan hidayah-NYA , sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dapat diselesaikan Secara substantif laporan kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka pengimplementasian Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan,serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Palu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021,dan bermaksud mengGambarkan sejauh mana Pemerintah Kota Palu mengimplementasikan SAKIP ditahun 2019,sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi dan coaching clinic ataupun pendampingan yang dilakukan oleh tim Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Government* dan *Clean Government*.Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menguraikan tentang upaya yang dilakukan dan masalah yang dihadapi dalam menerapkan akuntabilitas kinerja di Kota Palu hasil perbaikan serta rencana perbaikan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan .

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Palu dan semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunya Laporan ini.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Palu, Januari 2019



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga Gambaran hasil capaian kinerja atas penyajian laporan kinerja Pemerintah Kota Palu yang telah berorientasi hasil (*outcome*).

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Palu Perubahan Tahun 2016-2021. Tahun 2019 Pemerintah Kota Palu menetapkan 9 sasaran strategis dan 18 Indikator sasaran yang dengan rincian sebagai berikut:

Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja
Misi 2 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
Misi 3 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja
Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 4 (empat) indikator kinerja
Misi 5 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja
Misi 6 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil Analisis pencapaian indikator sasaran Terhadap pencapaian target indikator kinerja terhadap 9 sasaran yang mencakup 18 indikator kinerja dikategorikan sangat berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 90,69 % atau berkategori Sangat Berhasil. Dengan demikian realisasi capaian kinerja Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2019 dikategorikan Sangat Berhasil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTARTABEL	iv
DAFTARGAMBAR.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Kota Palu.....	3
1.3. Organisasi KotaPalu.....	9
1.4. Permasalahan Umum dan Isu Pemerintah Kota Palu.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.1.Penetapan Indikator Kinerja Utama	15
2.2.PerjanjianKinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1.CapaianKinerja PemerintahKotaPalu.....	20
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis.....	23
3.3. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis.....	25
3.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2019.....	40
3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2019.....	42
3.6. Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi dan Capaian Kinerja Serta Solusinya.....	46
3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	46
3.8. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019	49
3.9. Pendapatan	50
3.10. Belanja daerah	51
3.11. Pembiayaan	52
BAB IV PENUTUP.....	54

LAMPIRAN:

1. Pernyataan telah Direviu oleh Inspektorat Kota Palu.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
4. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019.
5. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019.
6. Penghargaan Pemerintah Kota Palu

Pemberian Opini WTP Tahun 2019 Oleh BPK Perwakilan Sulteng

Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Capaian Realisasi Kinerja dan Serapan anggaran dengan memperoleh predikat B

DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah.....	2
Tabel1.2	Evaluasi Pendapatan Tahun 2016-2019.....	2
Tabel1.3	Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2019...	4
Tabel1.4	Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibu Kota kecamatan dengan Ibu Kota Palu Tahun 2019.....	4
Tabel 1.5	Letak Kecamatan menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2019.....	6
Tabel 1.6	Ketinggian Kelurahan dari Permukaan laut Menurut Kecamatan di Kota palu Tahun 2019.....	7
Tabel 1.7	Nama Sungai yang mengalir di Kota Palu menurut Kecamatan	8
Tabel 1.8	Keadaan Iklim rata-rata Kota Palu Tahun 2011-2019.....	9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2019	17
Tabel 3.1	Capaian IKU Tahun 2019.....	20
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019.....	23
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS.....	26
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu.....	26
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pendidikan Dasar Bagi Usia Wajib Belajar 9 Tahun.....	27
Tabel 3.6	Capaian Sasaran Strategis Terlaksananya Peningkatan Pendidikan Agama dan Budaya.....	28
Tabel 3.7	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat.....	30
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Strategis Penguatan Sumberdaya	

Manusia;Penguatan IKM;Pengembangan IKM;Perbaikan Produksi.....	31
Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengembangan Usaha Mikro.....	32
Tabel 3.10 Capaian Sasaran Strategis Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) berbasis Budaya.....	32
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Program, Kegiatan, dan Anggaran yang Transparan, Akuntabel dan responsive....	33
Tabel 3.12 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Transportasi yang Aman dan Nyaman	34
Tabel 3.13 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Penataan Dekorasi Kota Yang Tertib, Indah dan Memiliki Nilai Budaya...	35
Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Stategis Terwujudnya Ruang Publik Kota yang Berbasis Nilai Budaya.....	36
Tabel 3.15 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Kota Yang Partisipatif.....	36
Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pusat-pusat Wisata Berbasis Budaya dan Religi.....	38
Tabel 3.17 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Nilai-nilai Toleransi, Kekeluargaan dan Kegotong-royongan dalam Menjaga Keserasian Sosia.....	39
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahuin 2017 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019	40
Tabel 3.19 Perbandingan Target Kinerja Dalam RPJMD 2016-2019	42
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2019 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2019	47
Tabel 3.21 Realisasi pendapatan daerah Kota Palu tahun 2019 Per 30 Desember 2019	51
Tabel 3.22 Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu Bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selain sebagai Bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun Berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) Bulan setelah tahun anggaran Berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kota Palu Berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 telah dilakukan dengan pembahasan rancangan awal Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu yang ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan tentang Persetujuan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021.

Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pertimbangan sebagai Berikut :

1. Nomenklatur Perangkat Daerah Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan nomenklatur perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini :

Tabel 1.1
Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah Sebelum Perubahan RPJMD	Perangkat Daerah Setelah Perubahan RPJMD
1	Dinas Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Dinas PemBerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas PemBerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Dinas Sosial dan PM	Dinas Sosial
6	BKD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pariwisata

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Palu, Tahun 2019

2. Penyesuaian Pendapatan Daerah

Hasil evaluasi terhadap pendapatan daerah Kota Palu, Tahun 2017, dan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Evaluasi Pendapatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Realisasi 2017 Rp	Realisasi 2018 Rp	2019		2020		2021	
				Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp	Sebelum Perubahan Rp	Setelah Perubahan Rp
				1	PENDAPATAN	1.340.906.455.717,20	1.311.034.004.626,00	1.342.070.229.259,12	2.138.477.838.779,85
1.1	Pendapatan Asli Daerah	283.967.304.727,00	283.255.362.937,00	297.286.349.598,35	185.340.331.559,65	306.082.732.732,54	215.776.148.712,00	315.705.887.714,72	226.797.609.341,00
1.1.1.	Pajak daerah	115.720.000.000,00	115.860.000.000,00	122.967.002.884,00	71.573.557.161,60	127.828.453.028,20	96.255.000.000,00	133.339.600.740,17	101.067.750.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	18.688.992.075,00	17.762.050.285,00	19.327.771.532,94	13.751.205.217,05	20.354.938.017,89	13.227.380.200,00	21.387.643.832,55	13.888.749.210,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00	2.193.768.512,00	2.536.110.131,00	2.536.110.131,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	147.022.202.521,00	147.097.202.521,00	152.455.465.050,41	97.479.459.050,00	155.363.231.555,45	104.100.000.000,00	158.442.533.011,00	109.305.000.000,00
1.2	Dana Perimbangan	941.175.118.602,00	933.678.495.000,00	945.050.119.130,00	974.440.359.000,00	956.576.156.284,90	938.856.659.150,00	968.258.964.530,62	968.258.964.530,62
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	42.519.429.629,00	58.594.042.000,00	59.179.982.420,00	41.694.519.000,00	59.771.782.244,20	30.331.416.150,00	60.369.500.066,64	60.369.500.066,64
1.2.2.	Dana alokasi umum	671.600.353.000,00	671.600.535.000,00	678.316.540.350,00	706.850.885.000,00	685.099.705.753,50	709.876.943.000,00	691.950.702.811,04	691.950.702.811,04
1.2.3.	Dana alokasi khusus	227.055.335.973,00	203.483.918.000,00	207.553.596.360,00	225.894.955.000,00	211.704.668.287,20	198.648.300.000,00	215.938.761.652,94	215.938.761.652,94
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	115.764.032.388,20	94.100.146.689,00	99.733.760.530,77	978.697.148.220,20	102.545.198.557,30	136.325.825.767,65	107.807.383.485,17	107.807.383.485,17
1.3.1.	Hibah	40.066.280.000,00	3.000.000.000,00		870.600.272.869,00		38.720.722.082,00	-	-
1.3.2.	Dana darurat								
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	68.026.252.388,20	70.395.146.689,00	77.541.260.530,77	56.316.117.351,20	81.418.323.557,30	59.835.874.685,65	85.489.239.735,17	85.489.239.735,17
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	171.500.000,00	1.955.000.000,00	3.255.000.000,00	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.3.6.	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	18.750.000.000,00	18.937.500.000,00	51.780.758.000,00	19.126.875.000,00	35.769.229.000,00	19.318.143.750,00	19.318.143.750,00

* : Proyeksi pendapatan perubahan RPJMD Sumber : Bappeda Kota Palu, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah Kota Palu Berdasarkan kondisi ekonomi Kota Palu, khususnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 hingga Tahun 2016 sebesar 7,83% dan tingkat inflasi 5,52%serta Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah khususnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang terkait

dengan pengelolaan berbasis informasi teknologi perpajakan serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Palu selama Tahun 2017-2021 sebesar 0,95 %.

Dalam perjalanan periode P-RPJMD, terjadi Bencana alam gempa Bumi, likuifaksi, dan tsunami di Kota Palu yang juga Berdampak pada pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah Kota Palu mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal tersebut diakibatkan oleh rusaknya hotel, restoran, dan pusat jasa serta ribuan rumah rusak dan lenyap sehingga sebagian Sumber potensi pendapatan asli daerah hilang. Olehnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan pada Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019, pendapatan daerah berjumlah Rp 2.138.477.838.779,85 dimana terdapat hibah dari pemerintah pusat dana stimulan untuk pembangunan rumah rusak sebesar Rp 820.653.280.000, juga hibah dari Pemerintah daerah lain dan pihak swasta. Secara rinci rencana pendapatan daerah Kota Palu Tahun 2017-2021 adalah sebagai Berikut:

3. Penyesuaian tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program hasil pengendalian dan evaluasi terhadap tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program yang tercantum pada RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menunjukkan beberapa indikator sasaran belum *Specific* (spesifik), *Measurable* (Terukur), *Attainable* (Dapat dicapai), *Result Oriented* (Orientasi Tujuan), *Time Bound* (Batasan Waktu), dan *Continuous Improve* (Perbaikan Berkelanjutan). Hal ini Berdampak pada kesulitan dalam mengukur kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kota Palu.

Penyesuaian tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan pagu indikatif disebabkan karena terjadinya gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu pada tanggal, 28 September 2019. Berdasarkan kejadian tersebut, Wali Kota Palu mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Nomor 360/04/01/WK/2019 tanggal 29 September 2019, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/04/02/WK/2019 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2019, tanggal 29 September 2019, Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800/030/WK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu Nomor 360/043.32/BPBD/2019 tentang Komposisi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Palu Tahun 2019

4. Perubahan Sistematika Penyusunan RPJMD

Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 menyesuaikan dengan sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka sistematika penyusunan RPJMD dari semula sebanyak 10 bab menjadi 9 bab.

1.2. Gambaran Umum Kota Palu

1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Palu merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi Berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 (empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%).

Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,26	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
Kota Palu		395,06	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Luas wilayah Kota Palu menurut kecamatan diuraikan dalam Tabel 2.1, sementara jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Pusat Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 1.4

Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan Dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2019

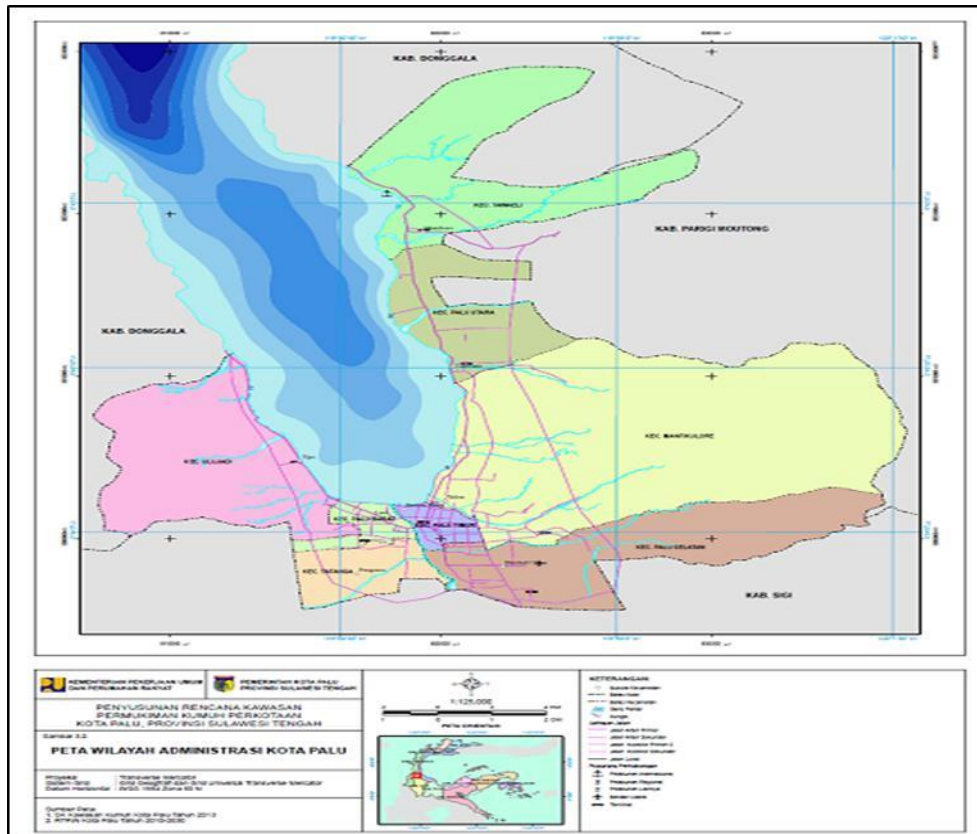
No.	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Ibu Kota	Jarak Melalui Darat (KM)
1.	Palu Barat	6	Lere	4
2.	Tatanga	6	Pengawu	6
3.	Ulujadi	6	Tipo	9
4.	Palu Selatan	5	BiroBuli Utara	2
5.	Palu Timur	5	Besusu Barat	3
6.	Mantikulore	8	Talise	3
7.	Palu Utara	5	MamBoro	10
8.	Tawaeli	5	LamBara	17
Jumlah		46	-	-

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan uraian pada Tabel 2.2 kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan sebanyak 8 (Delapan) kelurahan, sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

1.2.2. Letak, Kondisi Geografis

Kota Palu yang Berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0°36" - 0°56" Lintang Selatan dan 119°45" - 121°1" Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan terGambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Rencana Kawasan Pemukiman Tahun 2018

Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Kota Palu Berada di sekitar Garis Khatulistiwa terdiri dari 46 (empat puluh enam) kelurahan. sebagian besar kelurahan berada pada dataran lembah palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang pantai Teluk Palu. Letak kecataman Kota Palu menurut posisi pantai diuraikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 1.5

Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2019

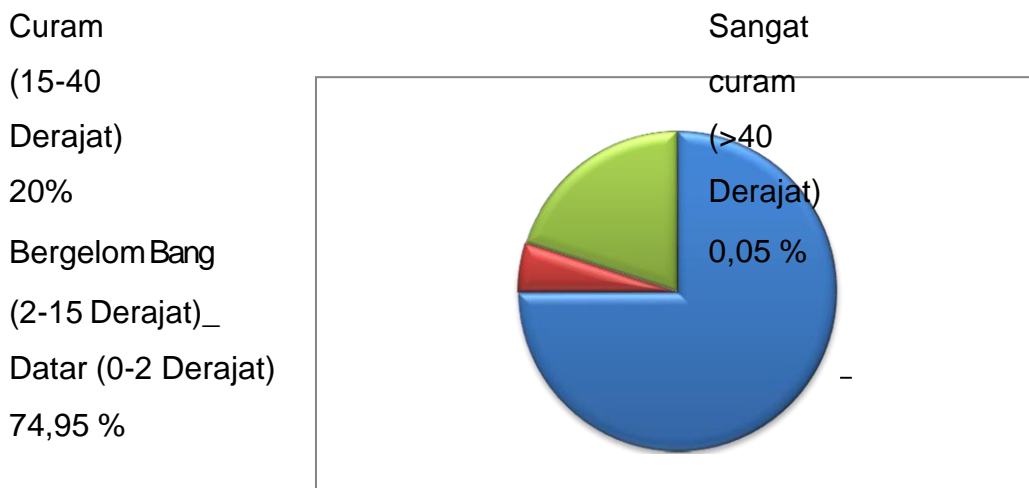
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		46	17	29

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 (empat) kelurahan yang Berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 1 (satu) kelurahan yang Berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya Berada pada wilayah bukan pantai.

1.2.3. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang dengan beberapa daerah yang berlembah. karakteristik kondisi topografi wilayah kota palu ditunjukkan dalam Gambar 1.2 dan tabel 1.6. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kota palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 75 % dari total luas wilayah. wilayah yang memiliki permukaan bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 20%. wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 20 %. terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan > 40 derajat. wilayah dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk dilakukan pada areal tersebut.



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Gambar 1.2
Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu

Tabel 1.6

**Ketinggian Kelurahan dari Permukaan Laut
Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Ketinggian dari Permukaan Laut		
			<500	500 – 700	700+
1	Palu Barat	6	6	-	-
2	Tatanga	6	6	-	-
3	Ulujadi	6	6	-	-
4	Palu Selatan	5	4	1	-
5	Palu Timur	5	5	-	-
6	Mantikulore	8	7	1	-
7	Palu Utara	5	5	-	-
8	Tawaeli	5	5	-	-
Kota Palu		46	44	2	-

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) kelurahan di kota palu yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. kelurahan yang memiliki ketinggian antara 500 – 700 meter dari permukaan laut sebanyak 2 (dua) kelurahan dan tidak terdapat kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari permukaan laut.

1.2.4. Kondisi Geologi

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu ini yang dilaporkan SPRS menunjukkan bahwa formasi geologinya terdiri dari batuan gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku (*innocous intrusiverocks*). disamping pula batuan-batuan metamorfosis dan sedimen.

Dataran Lembah Palu diperkirakan cocok untuk pertanian intensif. Geologi tanah dataran Lembah Palu terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang.

1.2.5. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karekteristik yang spesifik, sehingga BerBeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai dua musim. Kota Palu tidak dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai Non Zona Musim.

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (seBelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Matikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela.

Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.5 menunjukkan nama-nama sungai yang mengalir melewati semua kecamatan yang berada diwilayah Kota Palu.

Tabel 1.7
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungai Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2019

Kota Palu memiliki karakter klimatologi yang spesifik karena Kota Palu tidak dapat digolongkan daerah musim atau biasa disebut non zona musim. Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ketahun selama 5 tahun terakhir cukup stabil, namun pada Tahun 2016 sedikit mengalami perubahan yang cukup berarti. Perubahan yang cukup besar terjadi pada perubahan curah hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada Tahun 2015. Berikut ini Gambaran keadaan iklim rata-rata Kota Palu menurut suhu, kelembaban udara, curah hujan dan kecepatan angin.

Tabel 1.8
Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2014-2019

Rata-rata	2015	2016	2017	2018	2019
Suhu Udara (°C)	27,28	28,37	28.29	27.50	27.98
Tekanan Udara (mB)	1.011,1	1.011,7	1011.44	1008.24	1010.97
Kelembapan Udara (%)	77,88	72,51	75.33	79.32	70.82
Penyinaran Matahari (%)	63,06	73,43	67.49	59.08	64.17
Curah Hujan (mm)	58,76	41,06	54.84	71.83	48.58
Kecepatan Angin (knots)	3,83	4,53	4.59	4.50	4.50
Arah Angin Terbanyak	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut	Barat Laut

Sumber: Bps Kota palu

Suhu udara di Kota Palu selama lima tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,6°C Pada Tahun 2014 menjadi 27,98°C pada Tahun 2019. Kelembapan udara mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2014 rata-rata 77,88% menjadi 70,82% pada Tahun 2019. Kecepatan angin terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2014 rata-rata 3,83 knots menjadi 4,50 knots pada Tahun 2019. Arah angin di Kota Palu selama lima tahun terakhir umumnya bertiup dari arah Barat Laut.

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun susunan Organisasi Pemerintah Kota Palu terdiri dari :

Walikota dan Wakil Walikota Palu;

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD;

Inspektorat Daerah;

Dinas Daerah, terdiri dari :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Sosial;

Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Dinas Pariwisata;

Dinas Pemuda dan Olahraga;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Perhubungan;
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
Dinas Lingkungan Hidup;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Badan Daerah terdiri dari :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;
Badan Penelitian dan pengembangan Daerah;
Rumah Sakit Umum Anutapura ;
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.4 Permasalahan Umum dan Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

1.4.1. Permasalahan Umum

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. berikut beberapa permasalahan pembangunan di Kota Palu, sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :

a. Pendidikan

- Mutu hasil ujian nasional rendah.
- Masih terdapat anak putus sekolah.

B. Kesehatan

- Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan.
- Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah.
- Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas dan Pustu Belum sesuai standar.

- Kurangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- Rendahnya akses sanitasi yang layak.

c. Pekerjaan Umum

- Kebutuhan dan kelayakan air bersih Belum mencukupi dan memenuhi syarat.
- Banjir dan air yang tergenang di jalan karena tidak adanya saluran di sisi jalan mengarah ke Bawah trotoar yang Berlanjut ke drainase sekunder
- Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak dikelola dengan baik.

d. Penataan Ruang dan Pertanahan

- Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.
- Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut kelurahan.
- Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu.
- Belum optimalnya pendataan pertanahan.

2. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib yang tidak Berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang Berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu sebagai Berikut:

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
- Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah.
- Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- Masih kurangnya sampah yang dikelola oleh masyarakat.
- Kurangnya penghijauan di setiap pinggir jalan.
- Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan Baik.
- Belum ditanganinya secara Baik limbah industri, manusia, dan hewan.
- Belum optimalnya pengelolaan hutan kota.

Perhubungan

- Belum optimalnya pelaksanaan trayek angkutan umum dalam kota.
- Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan Barang.

Informatika

- Belum semua akses informasi tersedia secara realtime.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam mencapai Good Governance.
- Masih kurangnya Sumber daya manusia bidang teknologi informasi komunikasi yang handal dan profesional.

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya lokal.
- Masih terdapat koperasi tidak aktif

- Belum adanya data dasar UMKM.

Statistik

- Belum terintegrasinya data seluruh OPD.
- Belum optimalnya system informasi teknologi yang digunakan dalam pendataan.
- Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya mengintegrasikan data sektoral.
- Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang.

3. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu di antaranya teridentifikasi sebagai Berikut :

a. KeBudayaan dan Pariwisata

- Kurang tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata unggulan.

Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata dengan lembaga dunia usaha.

- Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota Palu.
 - Belum optimalnya peran organisasi, Birokrasi, swasta, profesi, dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
 - Kurangnya Sumber daya manusia pariwisata.
 - Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.
 - Tidak terorganisirnya event seni, Budaya dan pariwisata daerah.
 - Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan Budaya.
 - Belum tersedianya informasi Sumber daya Budaya yang akurat, terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat.
 - Pengelolaan situs cagar Budaya Kota Palu masih kurang.
 - Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni.
- Mulai hilangnya nilai-nilai Budaya lokal dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota.
- Tidak Berjalannya adat Budaya yang Berlaku di dalam masyarakat.

B. Pertanian

Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

- Menurunnya produktivitas dan mutu hasil pertanian seperti tanaman padi, kelapa dalam dan ternak.

c. Perdagangan dan Perindustrian

- Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian semakin menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Belum tumbuhnya investasi berbasis potensi Sumberdaya local yang berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.

4. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penunjang pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah Berkaitan urusan penunjang pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Masih Belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan perencanaan hasil aspirasi masyarakat.

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan perencanaan MusrenBang.

Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam MusrenBang.

Belum tersedianya Basis data yang valid untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Kurangnya pemahaman dalam mensinkronkan perencanaan Oraginasasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

B. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas Sumberdaya aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan aparatur daerah.

1.4.2. Isu Strategis Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan permasalahan umum Pemerintah Kota Palu sesuai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dapat diuraikan Beberapa isu strategis Pemerintah Kota Palu, sebagai Berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Daerah
2. Pembangunan Pendidikan Berkualitas dan Terjangkau
3. Pembangunan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
4. Kemiskinan Kota
5. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perkotaan
6. Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Sistem Transportasi Umum
8. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Berbasis Budaya
9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Pemukiman Kota
10. Pembangunan BerBudaya Dan Beradat

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016 – 2021. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan terhadap sasaran strategis yang ingin dicapai. Adapun IKU Pemerintah Kota Palu ditetapkan sebagai Berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja
1	2	2	3
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah
		3	Angka harapan lama sekolah
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah Berbasis kelompok kluster	6	Kontribusi Kategori industri pengolahan terhadap PDRB
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat
		8	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		9	Opini laporan keuangan
		10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat
		12	Rasio sampah tertangani
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup
		15	Rasio jalan kondisi mantap
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana	16	Indeks resiko Bencana
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan Beragama
		18	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, maka sasaran strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 sebagai Berikut :

- Misi 1 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja
- Misi 2 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 3 (tiga) indikator kinerja
- Misi 3 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja
- Misi 4 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 4 (empat) indikator kinerja
- Misi 5 terdapat 2 (dua) sasaran, dan 6 (enam) indikator kinerja
- Misi 6 terdapat 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu Tahun 2019, merupakan tolok ukur pengukuran capaian kinerja Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Gambaran Lampiran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dapat di uraikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Palu
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	90 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah	11,36
		3	Angka harapan lama sekolah	16,42
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,44
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	18,63
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	9,77
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	78,48 (Baik)
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0100
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	B
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat	94% (18 kw)
		12	Rasio sampah tertangani	90%
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota Kota	77,51%
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup	>72
		15	Rasio jalan kondisi mantap	68,16%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	16	Indeks resiko Bencana	119,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan Beragama	71
		18	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	26

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019.

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2019 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian IKU Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Rumus/Penjelasan
				Target	Realisasi	
1	2		3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya kota palu berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	90 %	100 %	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah	11,36	11,60	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-} i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
		3	Angka harapan lama sekolah	16,42	16,22	<p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia ($a, a+1, \dots, n$)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,44	71,20	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Rumus/Penjelasan
				Target	Realisasi	
1	2		3	4	5	6
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	18,63	13,10	BPS
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	9,77	6,49	BPS
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	78,48 (Baik)	86,75 % (Baik)	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0100	2,8985	Hasil penilaian Tim Nasional/Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	Hasil penilaian BPK
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	B	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat	94% (19 kw)	86,93% (18 kw)	Jumlah kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat/ jumlah seluruh kawasan x 100%
		12	Rasio sampah tertangani	90%	71,6%	Jumlah sampah tertangani / jumlah produksi sampah di Kota Palu x 100%
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota	77,51%	74,5%	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 / jumlah lintas trayek x 100/3
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup	>72	51	IKLH
		15	Rasio jalan kondisi mantap	68,16 %	53,97 %	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana budaya	16	Indeks resiko bencana	119,54	162,70	BNPB

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Rumus/Penjelasan
				Target	Realisasi	
1	2		3	4	5	6
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan beragama	71	90	Nilai indek kerukunan beragama berdasarkan variabel dan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
		18	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya	26	16	Jumlah peraturan perundang-undangan.

Sumber data: BPS Kota Paludiolahdan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh Berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis. Perumusan Indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indicator kinerja makro serta indicator kinerja strategis.

Adapun predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Nomor Evaluasi	Skalanilai(%)	Kesimpulan
1	85–100	Sangat Berhasil
2	70–85	Berhasil
3	55–70	Cukup Berhasil
4	<55	Tidak Berhasil

Secara rinci capaian masing-masing indicator kinerja sasaran strategis tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		INTERVAL (%)			
				TARGET	REALISASI	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	90 %	100 %				√
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,36	11,60				√
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	16,42	16,22				√
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	70,44	71,20				√
4	Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian dan IKM	5	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB	18,63	13,10				√
5	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster	6	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	9,77	6,49				√
6	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	7	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,48 (Baik)	86,75 % (Baik)				√
		8	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0100	2,8985				√
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP				√
		10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B		√		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	11	Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat	94% (18 kw)	86,93% (18 kw)				√
		12	Rasio Sampah Tertangani	90%	71,6%				√
		13	Cakupan Layanan Transportasi Kota	77,51	74,5%			√	
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>72	51				√
		15	Rasio Jalan Kondisi Mantap	68,16 %	53,97 %			√	
8	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Terdampak Bencana	16	Indeks Resiko Bencana	119,54	162,70				√

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		INTERVAL (%)			
				TARGET	REALISASI	<55	55-70	70-85	85-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat	17	Indeks Kerukunan Beragama	71	90				√
		18	Jumlah Kebijakan Pemda yang Berorientasi Kearifan Lokal dan Budaya	26	16		√		

Sumber data: BPS Kota Palu dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.3 Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 :

“Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS”

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	90 %	100 %	111,11

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber Daya Kota Palu Berbasis GIS” dengan indikator kinerja “Persentase Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi” dicapai sebesar 111,11% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Palu yang mempunyai peran serta dalam meningkatkan kualitas sistem informasi yang dimaksud.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu mempunyai peran dalam pengadaan penyediaan jaringan internet untuk 41 OPD dan 46 kelurahan di wilayah Pemerintah Kota Palu dengantarget capaian pada tahun 2019 adalah 90 %. Dalam pelaksanaannya, penyediaan jaringan internet di Pemerintahan Kota Palu telah direalisasikan sebesar 100 %, yakni keseluruhan Perangkat Daerah dan kelurahan telah mendapatkan akses jaringan internet.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu dalam hal pemanfaatannya, telah mendorong penggunaan sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu berbasis GIS sebagai basis data pembangunan yang terintegrasi dari tingkat Perangkat Daerah, wilayah Kecamatan sampai di tingkat Kelurahan melalui Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi yang dicapai sebesar 100%, yakni telah menyentuh kepada seluruh Perangkat Daerah sampai pada tingkat Kelurahan.

Sasaran 2 :

”Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan“

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,36	11,60	97,93
2	Angka Harapan Lama Sekolah	16,42	16,22	98,78

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 dengan sasaran strategis “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan” dengan indikator kinerja “Angka Rata-Rata Lama Sekolah” dengan capaian kinerja sasarannya sebesar 97,93%.

Kondisi ini sesungguhnya menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah telah dicapai dengan cukup optimal. Untuk menunjukkan kondisi angka rata-rata lama sekolah yang optimal, kondisi realisasinya seharusnya direalisasikan dengan angka yang lebih rendah dari target yang direncanakan.

Kota Palu yang masih dalam proses pemulihan pasca bencana yang terjadi pada akhir tahun 2018 telah mempengaruhi waktu penyelesaian pendidikan anak usia sekolah dalam menyelesaikan pendidikannya pada Tahun 2019.

Sedangkan sasaran strategis meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dengan indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” dengan capaian kinerja sasarannya sebesar 98,78% dengan predikat **Berhasil**.

Sasaran 3 :

“Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan”

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Harapan Hidup	70,44	71,20	101,08

Angka harapan hidup merupakan rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa dan/atau banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan” dengan indikator kinerja “Angka Harapan Hidup” dicapai sebesar 101,08% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata angka harapan hidup penduduk Kota Palu adalah 71 tahun. Peran Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palu yang menerapkan berbagai program dan kegiatan kesehatan, baik berskala Nasional maupun daerah telah berhasil menunjang angka harapan hidup di Kota Palu melalui perbaikan gizi masyarakat dan sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat yang terlaksana dengan baik.

Sasaran 4 :

”Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan
Perdagangan terhadap PDRB“

Tabel 3.6
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian dan IKM

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan Terhadap PDRB	18,63	13,10	70,32

Berdasarkan indikator kinerja “Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB” didapatkan hasil bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 sebesar Rp. 899.949,44 Milyar atau sebesar 3,63 dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 sebesar Rp. 2.350.196,68 Milyar atau sebesar 9,47.

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Revitalisasi Sektor Pertanian

dan IKM” dengan indikator kinerja “Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB” dicapai sebesar 70,32% dengan predikat **Berhasil**. Hal ini disebabkan oleh intervensi program dan kegiatan di bidang pertanian yang mempengaruhi sektor perdagangan.

Sasaran 5 :

”Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster“

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	9,77	6,49	66,43

Berdasarkan indikator kinerja “Kontribusi Katagori Industri Pengolahan terhadap PDRB” didapatkan hasil bahwa kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 sebesar Rp. 1.609.938,16 (Milyar) atau sebesar 6,49% dari total PDRB-ADHB yang tercatat sebesar Rp. 24.815.534,88 (Milyar) atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 9,77%, sehingga angka capaiannya sebesar 66,43% dengan predikat **Cukup Berhasil**.

Sasaran 6 :

”Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi“

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,48 (Baik)	86,75 (Baik)	110,53

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” dengan indikator kinerja “Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan persentase capaian kinerja sebesar 110,53% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Indikator kinerja Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan atas beberapa indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat

Daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 81,50%, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicapai sebesar 82,56%, dan Badan Rumah Sakit Umum Anutapura dengan angka capaian kinerja sebesar 96,18% dengan katagori **Baik**.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0100	2,8985	96,30

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 ayat (1) Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan ayat (2) Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi : (a) indeks capaian kinerja; dan (b) indeks kesesuaian materi. Penilaian total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemberian bobot sebagai berikut : (a) tingkat Indeks Capaian Kinerja (ICK) sebesar 95%; dan (b) tingkat Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sebesar 5%.

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja “Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”, realisasi dengan Skor 2,8985 dari target Skor 3,010 mendapat Prestasi Tinggi. Penilaian ini berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah EPPD yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 107/402/ITDA/G.ST/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu berada di urutan ke-7 dari 13 Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------

3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
---	------------------------	-----	-----	-----

Hasil evaluasi indikator kinerja “Opini Laporan Keuangan” Pemerintah Kota Palu di Tahun 2019 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sebanyak 4 kali yaitu Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Capaian sasaran ini diperoleh dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	B

Indikator Kinerja Utama Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Palu Mendapatkan Nilai B, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2019.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran di dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kota Palu sudah baik, namun masih memerlukan perbaikan dan tindak lanjut beberapa hal, antara lain :

Menerapkan budaya kinerja pada setiap jenjang manajerial dan melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala.

Meningkatkan kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis dalam renstra OPD sehingga lebih berorientasi pada hasil dan relevan dengan sasaran yang akan di capai. Selain itu Renstra OPD di lengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja pada jangka menengah

Meningkatkan kualitas cascading kinerja dengan menggunakan logic model yang menggambarkan hubungan kausalitas antara sasaran yang akan di wujudkan dengan program kegiatan, sehingga tercipta keselarasan mulai dari level organisasi sampai individu.

Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja sehingga dapat menciptakan *Performance Based Budgeting*.

Laporan kinerja di tingkat OPD harus menyajikan analisis pencapaian kinerja, perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi

penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, bukan melaporkan capaian dari setiap aspek/ urusan .

Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi sistim AKIP kepada OPD melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola Sakip sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi Sakip secara signifikan di lingkungan pemerintah Kota Palu, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi / perbaikan tersebut sehingga betul betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

Sasaran 7 :

”Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur“

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat	94%	86,93%	92,48

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur” dengan indikator kinerja “Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat” diperoleh persentase capaian sebesar 92,48% dengan predikat **Berhasil**.

Indikator kinerja Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat dicapai berdasarkan beberapa indikator kinerja perangkat daerah yang melakukan intervensi kawasan seperti Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui indikator kinerja Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertata, dengan angka capaian kinerja sebesar 86,87 % dan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dengan angka capaian kinerja sarannya sebesar 89 %. Dinas Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dicapai sebesar 73,50%. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan indikator Kinerja Persentase Pusat Wisata Berbasis Budaya Dan Religi dicapai sebesar 90%. Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan dengan Indikator kinerja Ketersediaan Kawasan Publikasi Kota dicapai sebesar 100% dan indikator Persentase Bangunan yang Memenuhi Syarat Tata Bangunan dan Keandalan Bangunan yang dicapai sebesar 82,20%.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
----	-------------------	--------	-----------	-----------

2	Rasio Sampah Tertangani	90%	71,60%	79,56
---	-------------------------	-----	--------	-------

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur” dengan Indikator kinerja “Rasio Sampah Tertangani” dicapai sebesar 79,56% dengan predikat **Berhasil**.

Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki Satgas K5 pada 46 Kelurahan di Kota Palu yang bertugas sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan di masing-masing kelurahan dalam bentuk Gerakan Gali Gasa telah berupaya secara maksimal untuk dapat memotivasi masyarakat agar segera bangkit dalam mewujudkan kembali kebersihan Kota Palu sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.14
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
3	Cakupan Layanan Transportasi Kota	77,51	74,50	96,12

Hasil evaluasi dari indikator kinerja ketiga yaitu “Cakupan Layanan Transportasi Kota” dengan capaian Tahun 2019 sebesar 96,12% diperoleh dengan predikat **Sangat Berhasil**. Hal ini didukung oleh ketersediaan terminal kota, halte, penambahan jumlah lintasan trayek penataan titik parkir, dan penertiban angkutan kota yang direalisasikan dengan baik yakni 74,50%.

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>72%	51%	70,83

Hasil evaluasi capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur”, dengan indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dicapai sebesar 70,83% dengan predikat **Berhasil**.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup menggunakan variabel pengukuran : *deficit* perumahan, akses pasokan air, sanitasi yang baik, akses penyediaan layanan listrik, akses pendidikan, akses layanan kesehatan dan tingkat pendapatan pribadi atau rumah tangga.

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
5	Rasio Jalan Kondisi Mantap	68,16%	53,97%	79,18

“Jalan Dalam Kondisi Mantap” adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan di Kota Palu. Panjang jalan Kota Palu dalam kondisi baik dan sedang pada Tahun 2019 adalah 459,58 km dan total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kota Palu adalah 851,558 km.

Pencapaian Indikator “Rasio Jalan Kondisi Mantap” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu terealisasi sebesar 53,97% dengan persentase capaian sebesar 79,18% dengan predikat **Berhasil**. Meskipun demikian, kondisi ini belum dikategorikan Sangat Berhasil disebabkan karena semua jalan yang rusak akibat bencana alam belum dapat ditangani secara tuntas.

Sasaran 8 :

“Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana”

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Terdampak Bencana

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Resiko Bencana	119,54%	162,70%	73,47

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), *kerentanan (vulnerabilities)*, Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Berdasarkan indeks risiko Bencana Indonesia, wilayah Sulawesi Tengah memiliki skor 158 dengan kelas risiko Bencana tinggi dan untuk Kota Palu indeks Resiko Bencana memiliki skor 162,70% dan termasuk risiko multi ancaman tinggi.

Sasaran 9 :

“Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam Berbagai aspek kehidupan masyarakat”

Tabel 3.19

Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kerukunan Beragama	71	90	126,76

Hasil capaian sasaran strategis “Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat” dengan indikator kinerja “Indeks Kerukunan Beragama”, terealisasi nilai sebesar 90 dan capaian sebesar 126,76% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Pencapaian indikator kinerja indeks kerukunan beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama dari hasil pengukuran beberapa indikator yaitu :

- (a) toleransi yang didalamnya ada saling pengertian, saling menerima, saling menghormati dan menghargai perbedaan sesama pemeluk agama;
- (b) kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas;
- (c) kerjasama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan; dan
- (d) potensi lokal, meliputi dukungan sumber daya lokal seperti ormas, tokoh agama, tokoh adat, tokoh etnik, dan hukum adat dalam mendukung tercapainya kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.20

Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Lembaga Seni Budaya yang Berperan dan Berfungsi Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Aspek Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	Jumlah Kebijakan Pemda yang Berorientasi Kearifan Lokal dan Budaya	26	16	61,54

Untuk evaluasi terhadap indikator kinerja “Jumlah Kebijakan Pemda yang Berorientasi Kearifan Lokal Dan Budaya”, terealisasi sejumlah 16 (enam belas) kebijakan dengan pencapaian sebesar 61,54% dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni pembuatan Surat Keputusan sejumlah 10 (sepuluh) Keputusan, 1 (satu) *Memorandum Of Understanding*, 3 (tiga) Peraturan Daerah dan 2 (dua) Peraturan Wali Kota yang berhubungan dengan seni budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Palu.

3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Gambaran perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2018 dengan

Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Target 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Target 2019
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	77,77 %	100%	100 %	111,11
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,33	100%	11,60	97,93
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	16,20	100%	16,22	98,78
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,31	100%	71,20	101,08
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian	5	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB	13,90	100%	13,10	70,32
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	7,1%	100%	6,49	66,43
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77,48 (Baik)	100%	86,75 % (Baik)	110,54
		8	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0000	100%	2,8985	96,30
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
		10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	B	B
7	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur	11	Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat	86% (18 kw)	100%	86,93% (18 kw)	92,48
		12	Rasio Sampah Tertangani	65%	100%	71,6%	79,56
		13	Cakupan Layanan Transportasi Kota	79,10	100%	74,5%	96,12
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	87,49	100%	51	70,83
		15	Rasio Jalan Kondisi Mantap	75%	100%	53,97 %	79,18

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	% Capaian Target 2018	Realisasi Tahun 2019	% Capaian Target 2019
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana	16	Indeks Resiko Bencana	119,54	100%	162,70	73,47
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks Kerukunan Beragama	71	100%	90	126,76
		18	Jumlah Kebijakan Pemda yang Berorientasi Kearifan Lokal dan Budaya	25	100%	16	61,54

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target RPJMD Tahun 2019

Target Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016– 2021 dengan rincian diGambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.22
PerbandinganTarget Kinerja dalam RPJMD (2016–2019)

No	Sasaran Startegis	No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019	% Capaian target	Rumus
1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	90%	100%	111,11%	Hasil survei dibagi pemetaan potensi dikali 100 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,36%	11,60%	97,93%	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <p>a. Tidak pernah sekolah = 0</p> <p>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p> <p>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</p> <p>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</p> <p>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p>

No	Sasaran Startegis	No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019	% Capaian target	Rumus
		3	Angka Harapan Lama Sekolah	16,42%	16,22%	98,78%	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"> Formula → $HLS_a^t = FK \times \frac{\sum_{i=a}^n E_i^t}{P_i^t}$ </div> <p><small>Keterangan:</small></p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia (a, a+1, ..., n)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	70,44%	71,20%	101,08%	Jumlah umur orang yang meninggal / jumlah orang yang meninggal
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perdagangan terhadap PDRB	18,63%	13,10%	70,32%	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	9,77	6,49	66,43%	Harga = (nilai rata-rata / 100)*PDRB tahun 2015
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	78,48 (Baik)	86,75 (Baik)	110,54%	Rata-rata nilai IKM OPD/unit pelayanan publik
		8	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,0100	2,8985	96,30%	Nilai indeks capaian kinerja (ICK) dan nilai kesesuaian materi (IKM) 100%
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Hasil penilaian BPK
		10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	Hasil penilaian KEMENPAN-RB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan Kawasan Terintervensi Berbasis Budaya dan Adat	94% (18 kw)	86,93% (18 kw)	92,48%	Jumlah kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat / jumlah seluruh kawasan x 100%

No	Sasaran Startegis	No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019	% Capaian target	Rumus
		12	Rasio Sampah Tertangani	90%	71,60%	79,56%	Jumlah sampah tertangani / jumlah produksi sampah di Kota Palu x 100%
		13	Cakupan Layanan Transportasi Kota	77,51%	74,50%	96,12%	Jumlah titik parkir x jumlah pelayanan angkutan masal x 100 jumlah lintas trayek x 100/3
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	>72	51	70,83%	IKLH
		15	Rasio Jalan Kondisi Mantap	68,16%	53,97%	79,18%	Jumlah jalan dalam kondisi mantap / jumlah di Kota Palu x 100%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana Budaya	15	Indeks Resiko Bencana	119,54	162,70	136,11%	IRB
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam Berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks Kerukunan Beragama	71	90	126,76%	Nilai indeks kerukunan beragama berdasarkan variabel dan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama
		18	Jumlah Kebijakan Pemda yang Berorientasi Kearifan Lokal dan Budaya	26	16	61,54%	Jumlah peraturan perundang-undangan

Sumber data : BPS Kota Palu diolah dan Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.6 Faktor Penyebab yang Mempengaruhi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja serta solusinya

Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2019 sesuai target RPJMD Tahun 2016-2021. Terjadinya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menyebabkan terjadi kerusakan dan kerugian di beberapa sektor diantaranya : sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi dan sektor sosial.

Solusinya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu,

diantaranya :

Rekomendasi pemulihan masalah perumahan :

Pembangunan hunian tetap, berguna sebagai pendorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat;

Perlu bantuan stimulan perumahan dan bantuan teknis pembangunan/perbaikan rumah;

Pembangunan hunian tetap, dilakukan bersamaan dengan prasarana lingkungan pemukiman, termasuk sanitasi yang memadai;

Proses relokasi mempertimbangkan, zona aman bahaya / bencana, dan dekat dengan sumber mata pencarian.

Rekomendasi pemulihan masalah pekerjaan dan penghidupan, yaitu:

Memberikan prioritas pekerjaan baru bagi orang yang kehilangan pekerjaan;

Memberdayakan tenaga lokal, melalui padat karya proyek-proyek pemerintah;

Memulihkan sektor pariwisata sebagai *trigger* pemulihan ekonomi;

Modal usaha untuk membangkitkan ekonomi lokal, terutama sektor usaha kecil dan menengah;

pelatihan Bagi para pelaku usaha kecil dan menengah;

Rekomendasi pemulihan masalah sumber pangan dan air bersih, yaitu :

Bidang air bersih :

Optimalisasi sumber air baku;

Perbaikan instalasi air bersih di daerah terdampak bencana;

Bantuan sarana penyimpanan;

Bantuan langsung air bersih;

Pengeboran melalui proses pengkajian kelayakan sumber air.

Bidang pangan

Penyaluran bantuan keuangan berupa makanan yang melalui mekanisme pasar dapat mempercepat pemulihan perekonomian, karena mendorong transaksi jual beli di wilayah terdampak bencana.

Rekomendasi pemulihan masalah kesehatan dan pendidikan, yaitu :

Pembangunan gedung sekolah dan puskesmas yang aman;

Bantuan *trauma healing*;

Beasiswa melalui Bidik Misi untuk perguruan tinggi, misi diprioritaskan bagi korban bencana;

Pengembangan kurikulum untuk kesiapsiagaan bencana;

Pelatihan bagi guru atau simulasi bencana di sekolah.

Rekomendasi masalah sosial, budaya, dan agama, terdiri dari:

Dukungan rasa aman dalam beribadah dan aktivitas sosial budaya;

Penyediaan peralatan dan pengembangan *soft skill* untuk aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial;

Dukungan personil/tenaga untuk mendukung aktivitas ibadah dan sosial budaya.

Rekomendasi pemulihan masalah perlindungan kelompok rentan, terdiri dari:
 Rehabilitasi atau rekonstruksi rumah aman bagi kelompok rentan;
 Penyuluhan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 Pos pengaduan terutama untuk perlindungan perempuan serta kelompok pendukung bagi penyandang disabilitas;
 Pemberdayaan untuk perempuan dan kaum disabilitas melalui serangkaian pelatihan dan bantuan teknis.

Rekomendasi pemulihan masalah pengurangan resiko bencana, yaitu:
 Penyediaan informasi tentang bencana;
 Pengembangan sistem peringatan dini;
 Pelatihan dan pembentukan kelompok relawan kelurahan (Forum Penanggulangan Resiko Bencana Kelurahan);
 Simulasi bencana;
 Penyusunan rencana kontigensi;
 Penyediaan fasilitas darurat.

3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja Tahun 2019 dengan realisasi anggaran Tahun 2019 dengan rincian realisasi capaian target kinerja Tahun 2019 pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2019 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2019	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2019	% Capaian Target	Target Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi Anggaran 2019 (Rp)	% Capaian Target
----	-------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------	------------------------------	------------------

1	Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	90 %	100 %	111,11%	4.766.542.700	4.715.211.700	98,92
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah	11,36%	11,60%	102,11%	72.838.649.300	70.400.259.932	96,65
		3	Angka harapan lama sekolah	16,42%	16,22%	98,78%			
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,44%	71,20%	101,08%	189.630.020.653	176.418.382.524	93,03
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	18,63%	13,10%	70,32%	17.271.284.462	14.432.045.082	83,56
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	9,77	6,49	66,43%	2.574.524.400	2.147.221.046	83,40
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	78,48 (Baik)	86,75 (Baik)	110,54%	10.550.263.580	9.801.582.874	92,90
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0100	2,8985	96,30%			
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP			
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	B	B	B			
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat	94% (18 kw)	86,93% (18 kw)	92,48%	281.540.776.563	202.200.240.579	71,82
		12	Rasio sampah tertangani	90%	71,60%	79,56%			

		13	Cakupan Layanan Transportasi Kota	77,51	74,50	96,12%			
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup	>72	51	70,83%			
		15	Rasio jalan kondisi mantap	68,16%	53,97%	79,18			
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana Budaya	16	Indeks resiko Bencana	119,54	162,70	73,47%	58,919,907,200	27,141,041,960	46,06
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam BerBagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan Beragama	71	90	126,76%	8,738,592,021	8,367,224,754	95,75
		18	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya	26	16	61,54%	791,365,000	700,749,015	88,55

Sumber data : Laporan Kinerja OPD Kota Palu

3.8 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang Bersumber dari Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang Bersumber dari Dana Perimbangan;

Meningkatkan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sisi Belanja dengan pendekatan Rasionalitas, Realitas dan Proporsional;

Meningkatkan Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, Baik dalam Pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.338.505.391.883,-, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan :

Pendapatan sebesar Rp. 2.151.228.808.801,8

Belanja :

Belanja sebesar Rp. 2.346.917.220.306,33 yang terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.364.976.869.747,4 dan belanja langsung sebesar Rp. 981.940.350.558,93

Pembiayaan :

Penerimaan

Penerimaan sebesar Rp. 196.010.911.504,53

Pengeluaran

Pengeluaran sebesar Rp. 322.500.000,00

3.9 Pendapatan

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2016 – 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat dukungan dari masyarakat. Pada Tahun 2019 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.151.228.808.801,80,- Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.24
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu Tahun 2019
Per 31 Desember 2019

URAIAN	TARGET 2019	REALISASI	%
1	2	3	4
PAD	193.946.852.222,60	235.922.534.962,61	121,64%
Perimbangan	974.440.359.000,00	940.428.625.740,00	96,51%
Pendapatan Lain-lain yang Sah	982.841.597.579.,20	999.867.199.398,00	111,25%
Total	2.151.228.808.801,8	2.176.218.360.100,61	329,40%

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

Tabel 3.24 menjelaskan bahwa PAD melampaui target hal ini disebabkan pelampauan realisasi dari target pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 193.946.852.222,60 atau sebesar 121,64% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sebesar Rp. 982.841.597.579.,20 atau sebesar 111,25.

Realisasi dana perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp 974.440.359.000,00,- atau mencapai 96.51%. dari target yang direncanakan. Demikian halnya realisasi

pendapatan lain-lain yang sah terealisasi sebesar Rp. 999.867.199.398,00

3.10 Belanja Daerah

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 disusun Berdasarkan pendekatan rasional, realistis dan proporsional untuk mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan dalam RPJMD. Kebijakan Belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan ke dalam Tabel 3.26 :

Tabel 3.26
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN 2019 SETELAH PERUBAHAN		
		Anggaran Belanja (RP)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.364.976.869.747,40	544.785.927.954,00	39.91%
2	Belanja Langsung	981.940.350.558.93	794.049.824.047.18	80.86%
Total Belanja		2.346.917.220.306,00	1.338.835.752.001,18	120.77

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2019

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas menjelaskan bahwa belanja tahun 2019 sebesar Rp. 2.346.917.220.306,00,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.364.976.869.747,40,- (39,91%) dan belanja langsung sebesar Rp. 981.940.350.558.93 (80.86%), sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 1.338.835.752.001,18 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 544.785.927.954,00,- (39,91%) dan belanja langsung sebesar Rp. 794.049.824.047.18,- (80,86%) dengan rata-rata belanja sebesar 84,52%

3.11 Pembiayaan

Pembiayaan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2019 dilandasi atas pemikiran Bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Palu khususnya kepada pemBeris pinjaman dan umumnya kepada masyarakat.

Sumber penerimaan Pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemBerian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.26

Tabel 3.26
Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019 Setelah Perubahan		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	196.010.911.504,53	196.010.911.504,53	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	322.500.000,00	322.500.000,00	100,00

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu, 2019

Berdasarkan Tabel 3.26 di atas penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 yang ditargetkan sebesar Rp. 196.010.911.504,53,- terealisasi sebesar Rp. 196.010.911.504,53,- atau 100,00% dan pengeluaran Pembiayaan daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 322.500.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 322.500.000,00,- atau 100,00%

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Palu telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian dari 9

(sembilan) sasaran strategis yang mencakup 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Beberapa langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis, sebagaimana yang telah dijanjikan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Palu sebagai berikut :

Mengembangkan sistem informasi daerah yang berkualitas melalui penyediaan data potensi Sumberdaya daerah dan pengintegrasian data dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah Berbasis GIS;

Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik di setiap kecamatan;

Meningkatkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan Berkualitas;

Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan

Mengembangkan kluster industri kreatif di tiap wilayah kelurahan untuk mendukung pariwisata;

Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional berbasis budaya;

Meningkatkan kualitas wisata budaya melalui penataan dan pengelolaan infrastuktur berbasis budaya;

Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, antara lain rekomendasi pemulihan masalah perumahan, masalah Sumber pangan dan air bersih, masalah kesehatan dan pendidikan, masalah sosial, budaya, dan agama, masalah perlindungan kelompok rentan dan masalah pengurangan resiko bencana.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota palu tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta, dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Demikian penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 sebagai bahan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Kota Palu ke depan guna mewujudkan Kota Palu yang Berakuntabilitas. Semoga laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu tahun 2019 ini, Bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan Bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT KOTA PALU

Jl. Balaikota Utara No. 1 A Telp./Fax. (0451) 425542 Palu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PALU

TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palu, 30 April 2020
INSPEKTUR


DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19700582 200012 1 004



PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT KOTA PALU

Jl. Balaikota Utara No. 1 A Telp./Fax. (0451) 425542 Palu

Palu, 30 April 2020

Nomor : 706/ -LHR/RHS/IB-I/ITKOT
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu Atas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 dengan tolak ukur Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2016 – 2021 serta Perubahan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen lain yang mendukung dengan hasil sebagai berikut :

A. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Palu. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait tujuan memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat konidisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

B. Dasar Reviu

Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Intansi Pemerintah.

Surat Perintah Walikota Palu Nomor: 700/0599 /Itkot/2020 tanggal 10 Maret 2020

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Didi Bakran, S.H., M.Si	Penanggung Jawab
2	Dra. Ramni Mansoba, M.Adm.Kp	Wakil Penanggungjawab
3	Susik, SKM,M.Si	Ketua Tim
4	Fachrudin MG. Abd. Karim, SP,. M.Si	Anggota Tim
5	Andrie Novandy, S.PDI., M.M	Anggota Tim
6	Andi Syunandar B, S.IP, MM	Anggota Tim

D. Tujuan Reviu

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

E. Ruang lingkup pelaksanaan Reviu

Penelaahan Format, Mekanisme Penyusunan dan Subtansi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

F. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta terdapat beberapa rekomendasi kami mengarah perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Reviu atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Laporan kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 disusun oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota Palu No.050/172.a/BAPPEDA/2020 Tanggal 31 Januari 2020 dengan Leading Sektor Bappeda Kota Palu. Proses penyusunan laporan tersebut telah melalui proses mekanisme penyusunan yang memadai, namun masih terdapat kelemahan - kelemahan dalam pengendalian, kelemahan tersebut sebagai berikut :

Format

Laporan Kinerja masih ada yang belum menyajikan capaian kinerja IP, masih ada indikator belum ada realisasi yaitu *Cakupan Dekorasi Kota Bernilai budaya*.

Mekanisme penyusunan

Mekanisme dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja belum ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Analisis/Penjelasan dalam Laporan Kinerja (Lkj) belum diketahui oleh unit kerja dibawahnya.

Belum ada Keputusan Kepala Bappeda tentang Penunjukan Penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap satuan kerja terkait penyusunan laporan kinerja dan Batas Waktu Penyampaian LAKIP Satuan Kerja ke Tim Penyusun Lakip Kota Palu.

Subtansi

Indikator Kinerja sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan Cukup namun belum bersifat Outcome

Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Tujuan dan sasaran dalam RPJMD namun indikator kinerja masih sifat Output.

Rekomendasi

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, direkomendasikan kepada Walikota Palu kiranya dapat memerintahkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

Dalam Hal format Laporan Kinerja Agar :

Laporan Kinerja menyajikan akuntabilitas keuangan

Dalam Hal Mekanisme Penyusunan agar :

Mekanisme dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja belum ditetapkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Analisis/Penjelasan dalam Laporan Kinerja (Lkj) harus diketahui oleh unit kerja dibawahnya.

Penyajian dalam capaian kinerja harus menyajikan outcome

Dalam Hal Subtansi

Indikator Kinerja sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan Cukup

Sasaran strategis disajikan perbandingan capaian kinerjanya dan analisa atas capaian kinerja.

Indikator kinerja dalam LKj harus bersifat outcome

Terhadap pencapaian kinerja diakhir periode terdapat beberapa Indikator yang tidak akan tercapai tujuan, agar dilakukan revisi indikator, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD dan Revisi Indikator Lakip Pemerintah Kota Palu, sesuai dengan kondisi sekarang setelah terjadi bencana Alam di Kota Palu.

G. Tidak Lanjut Hasil reuiu sebelumnya

Saran dari Tim reuiu tahun lalu belum ditindaklanjuti

Demikian hasil reuiu ini kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Palu, 30 April 2020
INSPEKTUR


DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19700582 200012 1 004



PEMERINTAH KOTA PALU

INSPEKTORAT KOTA PALU

Jl. Balaikota Utara No. 1 A Telp./Fax. (0451) 425542 Palu

FORMULIR CHECK LIST

	Pernyataan	Check list
I	Format	<p>1.Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP Ya</p> <p>2.LKj telah menyajikan informasi target kinerja Ya</p> <p>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai Ya</p> <p>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan Ya</p> <p>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan Ya</p> <p>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan Ya</p>
II	Mekanisme penyusunan	<p>LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu Ya</p> <p>Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai Ya</p> <p>Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj Ya</p> <p>Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja Ya</p> <p>Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya Ya</p> <p>Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait Ya</p> <p>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. Ya</p>

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Ya
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Ya
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	Ya
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Ya
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Ya
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Ya
		Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	Ya
		11. IKU dan IK telah SMART	Tidak

Palu, 30 April 2020
INSPEKTUR



DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
 Pembina Tkt I
 NIP. 19700502 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

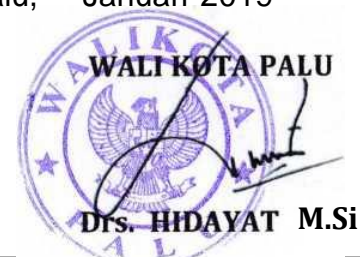
Palu, Januari 2019



**Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	90 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah	11,36
		3	Angka harapan lama sekolah	16,42
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,44
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	18,63
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	9,77
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	78,48 (Baik)
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	3,0100
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	B
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat	94% (19 kw)
		12	Rasio sampah tertangani	90%
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota Kota	77,51%
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup	>72
		15	Rasio jalan kondisi mantap	68,16%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana	16	Indeks resiko Bencana	119,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam BerBagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan Beragama	71
		18	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya	26

Palu, Januari 2019



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	4,477,695,200
2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	241,800,000
3	Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi	47,047,500
4	Program Pendidikan anak usia dini	2,203,498,600
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	26,203,897,818
6	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas	1,390,431,300
7	Program Palu Kana Mapande	4,320,099,500
8	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	3,422,586,950
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38,211,888,150
10	Program Pengawasan Obat & Makanan	18,468,750
12	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	1,130,180,000
13	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	444,047,400
14	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,422,598,875
15	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya	24,418,970,933
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	223,337,500
17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1,713,716,917
18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	91,210,680,178

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa/ RS Paru-Paru / RS Mata	27,413,545,000
20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	89,441,000
21	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	10,022,377,768
22	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2,705,257,800
23	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	1,854,184,394
24	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	2,600,023,500
25	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	963,378,000
26	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1,611,146,400
27	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	17,317,500
28	Program Penerapan dan Pengoperasian Teknologi	1,069,911,070
29	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2,263,590,000
30	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	169,137,000
31	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	2,480,207,150
32	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	452,125,205
33	Program Reformasi Birokrasi	44,337,500
34	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	152,695,000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
35	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,352,860,725
36	Program Pengembangan Aparatur Negara	57,194,000
37	Program perencanaan pembangunan daerah	3,010,844,000
38	Program Pengembangan Perumahan	5,868,171,844
39	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9,164,246,788
40	Program Perencanaan Tata Ruang	2,693,950,300
41	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13,431,036,050
42	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,050,681,079
43	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,466,907,500
44	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	145,559,800
45	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	176,180,564
46	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5,298,824,314
47	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	57,750,000
48	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	429,795,000
49	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	363,722,800
50	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	377,416,600

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
51	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	200,456,672,894
52	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	39,559,861,030
53	Program Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana	187,987,000
54	Program Kesiapsiagaan Bencana	599,102,200
55	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	227,348,000
56	Program Penyiapan Logistik Bencana	203,783,000
57	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	31,772,710,500
58	Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	64,383,500
59	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25,864,593,000
60	Program Palu Nobudaya Ante Nooda	103,028,750
61	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,672,654,000
62	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1,151,072,000
63	Program Bina Kemasyarakatan	1,600,192,047
64	Program Bina Sosial	261,350,000
65	Program Bina Kelembagaan	2,950,295,224
66	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	343,420,000
67	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	447,945,000



**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA PALU TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Hidayat, M.Si**

Jabatan : **Wali Kota Palu**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Palu, Januari 2020



Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi	95 %
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah	11,38
		3	Angka harapan lama sekolah	16,65
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup	70,56
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB	23,35
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Berbasis kelompok dan	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB	12,44
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat	79,48
		8	Nilai laporan penyelenggaraan	3,0150
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	BB
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi Berbasis Budaya dan adat	95%(20 kw)
		12	Rasio sampah tertangani	100%
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota	84,33%
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup	>70
		15	Rasio jalan kondisi mantap	79%
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak Bencana	16	Indeks resiko Bencana	110,54
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan Budaya dalam Berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan Beragama	72
		18	Jumlah kebijakan pemda yang Berorientasi kearifan lokal dan Budaya	27

Palu, Januari 2020



WALI KOTA PALU
[Signature]
Drs. HIDAYAT M.Si

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	186,259,000
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	62,850,000
3	Program Pendidikan anak usia dini	2,095,495,720
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	49,412,207,556
5	Program Pengembangan Pendidikan Non Formal/Dikmas	1,138,492,800
6	Program Palu Kana Mapande	5,397,275,500
7	Program Obat & Perbekalan Kesehatan	8,478,091,371
8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	44,247,329,879
9	Program Pengawasan Obat & Makanan	226,651,000
10	Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat	1,126,700,000
11	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular	334,391,000
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,270,726,000
13	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu Dan Jaringannya	5,685,838,051
14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	249,392,000
15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1,444,419,750
16	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	82,411,280,762
17	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa/ RS Paru-Paru / RS Mata	25,199,609,000
18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	88,167,600
19	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	2,709,383,500
20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2,926,762,441

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
21	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	166,787,000
22	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	1,337,843,400
23	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	319,045,700
24	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	819,581,300
25	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Daerah	176,636,500
26	Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	2,404,262,625
27	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	1,858,678,000
28	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	456,538,000
29	Program Reformasi Birokrasi	45,020,000
30	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	231,981,500
31	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4,859,785,500
32	Program Pengembangan Aparatur Negara	1,079,247,000
33	Program perencanaan pembangunan daerah	3,088,745,000
34	Program Pengembangan Perumahan	12,786,773,700
35	Program Lingkungan Sehat Perumahan	43,541,690,000
36	Program Perencanaan Tata Ruang	97,242,250
37	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13,382,107,400
38	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	15,904,061,500
39	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,734,955,000
40	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	112,060,000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
41	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	184,029,959
42	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	9,382,933,600
43	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	141,614,050
44	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	535,770,800
45	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	293,004,550
46	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	137,741,896,061
47	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	35,310,647,994
48	Program Kesiapsiagaan Bencana	359,270,800
49	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	220,791,000
50	Program Penyiapan Logistik Bencana	107,908,000
51	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	31,338,147,150
52	Program Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	4,050,000
53	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,269,843,250
54	Program Palu Nobudaya Ante Noadada	674,329,500
55	Program Pengembangan Nilai Budaya	605,908,500
56	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,728,361,500
57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2,348,500,000
58	Program Bina Kemasyarakatan	836,887,000
59	Program Bina Sosial	609,220,100
60	Program Bina Kelembagaan	3,947,566,104
61	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	156,790,000

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
62	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	15,496,866,380

Palu, Januari 2020





PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 050/394/Bappeda/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka pemerintah yang terpadu dan terarah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Indikator Kineija Utama (IKU) Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wall Kota tentang tentang Indikator Kineija Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara;
4. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejianjian Kineija, Pelaporan Kineija dan Tata cara Reviu atas laporan kineija instansi pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kineija Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kineija Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kineija utama Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kota Palu sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 30 April 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 050/394/Bappeda/2020
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PALU 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PALU

TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Potensi Sumber daya Kota Palu Berbasis GIS	1	Persentase pengembangan sistem informasi terintegrasi
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	2	Angka rata-rata lama sekolah
		3	Angka harapan lama sekolah
3	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	4	Angka harapan hidup
4	Meningkatnya revitalisasi sektor pertanian dan IKM	5	Kontribusi sektor pertanian dan perdagangan terhadap PDRB
5	Meningkatnya daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster	6	Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi	7	Rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat
		8	Nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
		9	Opini Laporan Keuangan
		10	Nilai sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
7	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	11	Cakupan kawasan terintervensi berbasis budaya dan adat
		12	Rasio sampah tertangani
		13	Cakupan layanan Transportasi Kota Kota
		14	Indeks kualitas lingkungan hidup
		15	Rasio jalan kondisi mantap
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat terdampak bencana	16	Indeks resiko bencana
9	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan budaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat	17	Indeks kerukunan beragama
		18	Jumlah kebijakan pemda yang berorientasi kearifan lokal dan budaya


 WALI KOTA PALU
 Drs. HIDAYAT M.Si

Piagam Penghargaan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019



Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah mengapresiasi Pemerintah Kota Palu atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu yang berhasil diraih selama lima tahun berturut-turut



Pemerintah Kota Palu menorehkan prestasi terbaik dengan mendapatkan penghargaan predikat B pada ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award 2019.

